

**PEMAHAMAN WARGA NU  
TERHADAP KHITTAH 1926**

**(Studi Perilaku Politik Warga NU Kecamatan Sukolilo  
Kota Surabaya pada Pemilu Tahun 2004)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**A M R O Z I**

**NIM: EO 1300141**

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2005**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Amrozi (NIM 1300141) ini telah  
Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.


Surabaya, 1 Pebruari 2005

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,




Dr. H. Abdullah Khozin Afandi, MA.  
NIP. 150 190 692


Tim Penguji :  
Ketua,

  
Drs. H. Mukhlis Sa'ad, MA.  
NIP. 150 270 859


Sekretaris,

  
M. Syamsul Huda, M.Fil.I  
NIP. 150 278 250

Penguji I,

  
Drs. Suhermanto  
NIP. 150 274 382

Penguji II,

  
Biyanto, M. Ag.  
NIP. 150 275 954

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Amrozi dengan judul :  
"Pemahaman Warga NU terhadap Khittah 1926"  
(Studi Feri aku Politik Warga NU Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya  
pada Pemilu Tahun 2004)  
telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, .....  
Pembimbing,

  
Drs. H. Mukhlisin Sa'ad, MA.

## ABSTRAKSI

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*) yang didirikan oleh sekelompok ulama pesantren pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Berdirinya NU merupakan reaksi defensif terhadap gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Islam modern.

Berdirinya NU yang semula sebagai organisasi keagamaan, lambat laun tergoda oleh rayuan politik praktis. Sehingga NU harus menukar baju organisasi keagamaannya menjadi organisasi yang bergelut dalam politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan.

Terhitung mulai tahun 1952 NU meleburkan diri secara aktif dalam politik praktis dengan menjadi partai NU. Seiring dengan perkembangan zaman, Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto memberangus sistem multi partai dengan hanya menyisakan dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu golongan karya (Golkar). Maka pada tahun 1971 NU berfusi dalam PPP bersama sejumlah partai politik, diantaranya Parmusi, PSII dan Perti.

Dinamika politik praktis yang dijalani oleh NU dirasa sangat tidak strategis untuk mempertahankan keberadaan NU. Akhirnya pada tahun 1984 di muktamar Situbondo, NU mendeklarasikan diri untuk kembali ke khittah 1926 dengan arti melepaskan diri dari ikatan politik praktis.

Ketika gelombang reformasi melanda Indonesia, NU mendapat desakan yang amat dahsyat dari warganya untuk mempunyai partai politik sendiri. Akhirnya pada Juli 1998 PBNU memfasilitasi berdirinya partai yang diklaim sebagai partainya warga NU, yaitu PKB.

Berdirinya PKB menimbulkan banyak kontroversi di kalangan warga NU. Sebagian mengatakan NU telah keluar dari jalur khittah 1926, sedang sebagian yang lain menegaskan bahwa kelahiran PKB tidak terjadi penyimpangan terhadap makna khittah 1926.

NU dengan massanya yang besar, memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan dunia politik. Seringkali NU harus berhadapan dengan sejumlah pihak dan oknum yang selalu ingin memanfaatkan suara warga NU yang besar itu. Tetapi seringkali pula, NU harus berada pada sisi dilema untuk merespon keinginan sejumlah pihak tersebut.



PERPUSTAKAAN	
JAIN SUNAN ANEEL SURABAYA	
NO. KLAS	NO. REG. <b>CE-2005/AJ/016</b>
	ASAL BUKU :
DAFTAR ISI	TANGGAL :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Abstraksi .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Bab I    Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penegasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
Bab II    Khittah NU tahun 1926 .....	14
A. Pengertian Khittah 1926 .....	14
B. Dasar Pemikiran Kembali ke Khittah 1926 .....	16
C. Dinamika NU Pasca Kembali ke Khittah 1926 .....	20
D. Politik NU Pasca Deklarasi PKB .....	24
E. Politik NU pada Pemilu Presiden .....	30

<b>Bab III</b>	<b>Pemahaman Warga NU Kecamatan Sukolilo tentang Khittah 1926 dan Perilaku Politiknya .....</b>	<b>33</b>
	<b>A. Kultur dan Geografis Kecamatan Sukolilo .....</b>	<b>33</b>
	<b>B. NU di Kecamatan Sukolilo .....</b>	<b>34</b>
	<b>C. Pemahaman tentang Khittah 1926 .....</b>	<b>36</b>
	<b>D. Perilaku Politik .....</b>	<b>39</b>
	<b>1. Pemilu Legislatif .....</b>	<b>39</b>
	<b>2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .....</b>	<b>43</b>
<b>Bab IV</b>	<b>Analisa Penelitian .....</b>	<b>47</b>
	<b>A. Pemahaman tentang Khittah 1926 .....</b>	<b>48</b>
	<b>B. Perilaku Politik Warga NU pada Pemilu 2004 .....</b>	<b>52</b>
	<b>1. Hubungan Organisasi NU dan Kyai dalam Politik .....</b>	<b>52</b>
	<b>2. Relasi Antar Warga NU .....</b>	<b>58</b>
<b>Bab V</b>	<b>Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>62</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>63</b>
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>64</b>
	<b>Daftar Pertanyaan .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel 1	: Kedudukan Informan dalam MWC NU Sukolilo dan Partai Politik .....	37
Tabel 2	: Pilihan Partai Politik dari Informan .....	37
Tabel 3	: Perolehan Suara dari Partai yang didukung Informan .....	40
Tabel 4	: Aktivitas PKB di Sukolilo .....	42
Tabel 5	: Pilihan Informan pada Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2004 di Sukolilo .....	44
Tabel 6	: Perolehan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2004 di Sukolilo .....	45

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*) secara resmi berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya.<sup>1</sup> Secara historis, berdirinya NU merupakan reaksi defensif terhadap pesatnya pembaruan Islam di Indonesia yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Sebagai upaya untuk mempertahankan ajaran tradisional dan madzhab di tanah suci yang baru dikuasai oleh golongan Wahabi di bawah raja Abdul Aziz bin Saud.<sup>2</sup>

NU lahir bukan dari kawasan politik yang mengejar kepentingan kursi di parlemen dan kekuasaan pemerintahan. Namun sejarah mencatat bahwa dinamika perkembangan bangsa Indonesia menuntut NU menjadi partai politik sendiri selama sembilan belas tahun (1952-1971)<sup>3</sup> dan berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Parmusi, PSII dan Perti (1971-1984).<sup>4</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, NU sebagai organisasi sosial keagamaan maupun sebagai partai politik mampu bertahan dan relatif bisa memainkan posisinya sebagai organisasi Islam, baik pada masa pra-kemerdekaan (1926-1945),

---

<sup>1</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu, 1985), 3.

<sup>2</sup> Bahrul Ulum, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi ?*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2003), 56.

<sup>3</sup> Anam, *Pertumbuhan.....*, 231.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 317.



pemerintahan Soekarno (1945-1965), pemerintahan Soeharto (1965-1998) maupun era reformasi saat ini (1998 s/d sekarang).

Pada pemerintahan Soekarno, NU menempati bagian yang cukup dan diberi kesempatan untuk terlibat secara proaktif dalam kancah kehidupan sosial politik pada tingkat elit. Baik ketika berada dalam partai Masyumi maupun ketika terlibat menjadi partai politik sendiri (April 1952).<sup>5</sup>

Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto (1965-1998), meskipun NU turut andil dalam membidani lahirnya pemerintahan ini, tetapi NU tidak pernah mendapat bagian yang menjanjikan. Bahkan dalam banyak hal, NU selalu dipinggirkan.

Pemerintahan Soeharto memulai Pemilu pertamanya pada tahun 1971 dengan diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya (Golkar). Dan NU sebagai partai sendiri mampu mengumpulkan 10.213.684 suara ( 18,7% ) sehingga meraih 58 kursi di parlemen. Jumlah ini lebih banyak diperoleh partai NU dibandingkan dengan Pemilu tahun 1955.<sup>6</sup>

Setelah Pemilu 1971 usai, pemerintah berusaha menyederhanakan jumlah partai yang ada menjadi 2 partai politik dan satu golongan karya. Partai-partai tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu "materil-spirituil" dan "spirituil-materil". Dan pada 1973 NU beserta Parmusi, PSII dan Perti yang masuk dalam

<sup>5</sup> Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2003), 39.

<sup>6</sup> Anam, *Pertumbuhan.....*, 313.

kategori “spirituil-materil” bergabung dalam satu partai yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>7</sup>

Tekanan dari penguasa orde baru terhadap NU tidak pernah dihentikan. Kali ini pemerintah melalui tangan PPP dari unsur MI (Muslimin Indonesia) melakukan pengecilan peran dan posisi politisi NU di PPP. Sehingga muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 menetapkan bahwa NU secara organisatoris keluar dari tubuh PPP. NU kembali ke khittah 1926 dan menjaga jarak yang sama dengan kekuatan partai politik apapun.<sup>8</sup>

Aksi keluarnya NU dari PPP memberi angin segar bagi kontestan pemilu yang lain, yaitu Golkar dan PDI. PBNU membuat intruksi yang ditandatangani oleh KH. As’ad Syamsul Arifin, KH. Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid dan HM. Anwar Nuris tertanggal 16 April 1987, yang berisi antara lain bahwa NU dilarang mencoblos PPP dan diperintahkan untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada salah satu dari Golkar atau PDI.<sup>9</sup>

Keputusan PBNU untuk menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik, menjadi semangat bagi kader-kader NU untuk masuk ke partai-partai politik. Sehingga menjadikan banyak kader NU berada di partai-partai yang berbeda. Beberapa elite NU diberi posisi di Golkar, seperti Slamet Efendi Yusuf (saat menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor) diangkat menjadi salah seorang pemimpin

<sup>7</sup> *Ibid.*, 317.

<sup>8</sup> Masykur Hasyim, *Memisantarakan Politik Islam, Jembatan Politik Partai Persatuan Pembangunan*, (Surabaya: Yayasan Sembilan Lima, 1998), 67.

<sup>9</sup> Ulum, *Badzahnya.....*, 98.

departemen pemuda DPP Golkar dan Abdurrahman Wahid diangkat sebagai anggota MPR mewakili kelompok masyarakat.<sup>10</sup>

Perubahan politik terjadi di Indonesia, di tengah-tengah kebangkrutan ekonomi dan politik orde baru, ketika gerakan mahasiswa berhasil menurunkan pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998.<sup>11</sup> Kemudian Habibie sebagai wakil presiden dari Soeharto diangkat oleh MPR menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Dalam pemerintahan transisi yang dikendalikan oleh Habibie, ia banyak melakukan tindakan populer guna mendongkrak legitimasinya. Di antaranya adalah diberikannya kebebasan mendirikan partai politik bagi seluruh masyarakat serta komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1999.<sup>12</sup>

Gagasan Habibie ini kemudian disambut masyarakat dengan mendirikan banyak partai politik. Begitu juga warga NU di seluruh penjuru tanah air menyambut peristiwa bersejarah tersebut dengan mengajukan usul agar PBNU segera menciptakan satu wadah yang berfungsi sebagai penyaluran aspirasi warga NU. Oleh Gus Dur (saat itu Ketua Umum PBNU) mereka disebut sebagai "orang yang seolah-olah sakit kalau tidak berpolitik, sehingga perlu dibuatkan wadah, biar tidak gentayangan tidak jelas".<sup>13</sup>

Keinginan warga NU untuk membuat parpol tampaknya harus berbenturan dengan keputusan muktamar NU ke-27 di Situbondo yang melarang secara

<sup>10</sup> *Ibid.*, 102.

<sup>11</sup> Abidin Amir, *Peta*....., 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid (sambutan sebagai Ketua Umum PBNU) dalam: *Dokumen Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (tt: DPW PKB Jawa Timur, 1998), 18.

organisatoris memasuki wilayah politik praktis atau berafiliasi dengan parpol.

Melihat fenomena tersebut, maka pada rapat harian PBNU tanggal 3 Juni 1998

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 disepakai untuk membentuk tim lima<sup>14</sup> yang bertugas untuk memenuhi aspirasi warga

NU.<sup>15</sup> Tim ini juga dibantu dengan tim asistensi yang berjumlah sembilan orang.<sup>16</sup>

Akhirnya pada tanggal 23 Juli 1998 secara resmi partai warga NU yang difasilitasi oleh PBNU itu dideklarasikan dengan diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang lahir dari komunitas NU ini dibidani oleh para kyai yaitu : KH. Ilyas Ruchiyat (Rois Syuriah PBNU), KH. Murasir Ali, KH. Mustofa Bisri, KH. Muchit Muzadi dan KH. Abdurrahman Wahid.<sup>17</sup>

Lahirnya PKB menimbulkan banyak protes dari kalangan warga NU yang lain. Sehingga kemudian banyak bermunculan partai-partai yang berbasis NU, diantaranya adalah SUNI (Serikat Uni Nasional Indonesia) pimpinan Abu Hasan, PNU (Partai Nahdlatul Ummah) dipimpin oleh KH. Syukron Makmun. PKU (Partai Kebangkitan Umat) dipimpin oleh KH. M. Yusuf Hasyim dan juga didukung oleh Salahuddin Wahid (adik Gus Dur).<sup>18</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Begitu juga, intruksi PBNU tentang PKB adalah satu-satunya wadah politik bagi warga NU ditentang secara keras oleh KH. Alawy Muhammad (anggota MPP

<sup>14</sup> Tim lima diketuai KH. Makruf Amin (Rais Syuriah PBNU) dengan anggota KH. M. Dawam Anwar (Katib PBNU), DR. KH. Said Agiel Siradj (Wakil Katib PBNU), HM. Rozi Mumir (Ketua PBNU) dan H. Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU).

<sup>15</sup> Ulum, *Bodohnya*....., 134.

<sup>16</sup> Tim asistensi diketuai oleh Arifin Junaidi (Wakil Sekjen PBNU), dengan anggota H. Muhyidin Arubusman, HM. Fachry Thaha Ma'ruf, H. Abd. Aziz, Drs. Andi Muarly Sunrawa, HM. Nasihin Iskandar, Des. Muhaimin Iskandar, Drs. H. Lukman Saifuddin Zuhri dan Drs. Amin Said Husni.

<sup>17</sup> Abidin Amir, *Peta*....., 113.

<sup>18</sup> Ulum, *Bodohnya*....., 135-146.



PPP). Menurutnya, warga NU tidak hanya ada di PKB, tetapi juga di partai-partai yang lain.<sup>19</sup>

Pemilu 1999 telah usai, PKB mampu mengungguli suara dari partai-partai lain yang berbasiskan warga NU. Dan pada pemilu ini, kader terbaik NU, Abdurrahman Wahid (saat itu menjadi Ketua Umum PBNU) terpilih secara demokratis menjadi presiden RI pada SU MPR tahun 1999. Abdurrahman Wahid mengalahkan Megawati dengan suara 373 melawan 313.<sup>20</sup>

Belum lama tahun perjalanan Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Bangsa Indonesia diributkan oleh berbagai kontroversi gaya kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* mendapat reaksi keras dari kalangan DPR dan menjadi pintu masuk untuk digelarnya sidang istimewa guna memecat (*impeachment*) Abdurrahman Wahid.

Kuatnya desakan agar Abdurrahman Wahid mundur, memancing PBNU, melalui ketua umumnya Hasyim Muzadi untuk melakukan safari politik guna menyelamatkan Abdurrahman Wahid. Lagi-lagi NU harus terjun dalam arena politik praktis.

Terseretnya NU dalam politik praktis untuk mempertahankan posisi Abdurrahman Wahid sebagai presiden, menjadi sesuatu yang tampaknya ganjil. Sekiranya peran ini harus dilakukan, maka mestinya PKB-lah sebagai partai politik yang melakukan bukannya NU.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 166.

Memasuki Pemilu 2004, hawa perpolitikan mulai panas. Pada satu sisi, NU yang memegang komitmennya pada khittah berusaha untuk bersikap netral dan menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan partai politik. Namun, sisi yang lain keputusan muktamar ke-30 di Kediri merekomendasikan kepada warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai yang difasilitasi oleh PBNU, yaitu PKB. Dari sinilah, kemudian menjadi tarik ulur antara PBNU dan PKB.

Perguncangan politik nasional ternyata juga berimbas sampai ke bawah. Tidak berlebihan jika kemudian di Sukolilo juga terjadi tarik ulur antara NU dan PKB. Kecamatan Sukolilo merupakan daerah bagian timur kota Surabaya. Secara geografis, masyarakatnya banyak dihuni oleh para petani, baik petani sawah maupun petani tambak ikan serta pedagang.

Menurut teori perilaku Geerts, masyarakat pedagang digolongkan dalam kriteria santri. Sedang kata santri, mempunyai dua makna yaitu: 1) sekelompok peserta didik dalam pesantren dan 2) akar budaya sekelompok pemeluk Islam.<sup>21</sup>

Kegiatan warga NU di kecamatan Sukolilo ini sangat dinamis. Hal ini terlihat jelas bahwa kepengurusan di tingkat ranting (kelurahan) terisi lengkap. Bahkan karena banyaknya anggota, sampai-sampai ada ranting yang dimekarkan menjadi KAR (Koordinator Anak Ranting).

Dalam memasuki Pemilu 2004, banyak kader (warga) NU kecamatan Sukolilo yang menjadi pengurus, simpatisan, caleg (calon legislatif) dari berbagai partai politik yang ada. Banyaknya kader NU yang terlibat dalam berbagai partai tersebut

<sup>21</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: SIPRES, 1994), 1.

menjadikan hawa perpolitikan NU di kecamatan Sukolilo sangat menarik untuk diteliti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman warga NU kecamatan Sukolilo terhadap khittah tahun 1926?
2. Bagaimana perilaku politik warga NU kecamatan Sukolilo pada pemilu 2004 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman warga NU kecamatan Sukolilo tentang khittah NU tahun 1926.
2. Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang perilaku politik warga NU di kecamatan Sukolilo pada pemilu 2004.

## **D. Penegasan Istilah**

Judul da am skripsi ini adalah “Pemahaman Warga NU Tentang Khittah 1926” dengan penjelasan sebagai berikut :

Pemahaman : Pengertian

- Warga NU : anggota dari suatu masyarakat atau sebuah organisasi. Dimana warga NU bersifat struktural dan kultural. Struktural adalah warga yang menjadi pengurus NU, sedang kultural adalah warga biasa.
- Khittah 1926 : Khittah berarti garis pendirian, perjuangan, kepribadian NU, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan maupun urusan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi.<sup>22</sup>

### E. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa pembahasan tentang NU sangat banyak sekali bagi dunia akademis. Diantaranya adalah yang ditulis oleh Hambali Rasidi (Ushuluddin: 1999) "*Studi Pemikiran Pola Gerakan Politik NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*".

Dalam karyanya ini, Hambali Rasidi menguraikan tentang peran NU dalam pecaturan kehicupan perpolitikan bangsa Indonesia dalam batasan NU setelah kembali ke khittah 1926 yang diputuskan dalam muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984.

Juga tercapat tulisan lain dari Juned Mokhar Hakim (Dakwah: 2000) "*NU, Politik dan Dakwah Islamiyah: Kajian Sejarah NU Tahun 1950 – 1984*". Dalam karyanya ini, Juned memaparkan peran NU secara historis yang dimulai dari tahun

---

<sup>22</sup> Achmad Sidiq, *Penjelasan Khittah NU*, dalam Laode Ida, *Anatomi Konflik, NU, Islam dan Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, ?), 59.



1950 (ketika NU menjadi partai politik orde Soerarto) sampai dengan tahun 1984 (ketika NU memutuskan kembali ke khittah 1926).

Di samping itu terdapat tulisan Choirul Anam (Surabaya: 1999)

“*Pertumbuhan dan Perkembangan NU,*” yang merupakan karya tulis yang sangat lengkap tentang NU. Dalam buku ini Anam memaparkan tentang gambaran umum NU, motivasi berdirinya NU sampai pembahasan tentang kiprah NU sebagai partai politik dan juga peran NU ketika kembali ke khittah 1926.

Secara khusus, terdapat juga tulisan dari Khoiro Ummatin (Yogyakarta: 2002) yang berjudul : *Perilaku Politik Kiai*. Tulisan ini merupakan tesis pascasarjananya dengan melakukan penelitian studi kasus di Yogyakarta. Dalam tulisan ini, Ummatin mengungkap adanya pergeseran peran kiai ketika terjun dalam gelanggang politik.

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Untuk itu perlu dilakukan sejumlah langkah untuk melakukan penelitian.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini melakukan pengumpulan data dengan cara :

#### a. Observasi

Langkah yang diambil pada tahap ini adalah melakukan pengamatan atas perilaku warga NU di Kecamatan Sukolilo pada pemilu tahun 2004. Di mana peneliti terlibat secara langsung dalam segala kegiatan warga NU di Sukolilo.

b. Interview :

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara terhadap lima orang informan (ada pada bab III) yang menjadi warga NU di Sukolilo.

c. Dokumentasi :

Guna melengkapi hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan, maka perlu juga mencari data yang berupa spanduk, selebaran atau surat-surat lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan merupakan salah satu pertimbangan dalam masalah penelitian. Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasi sebagai berikut :<sup>23</sup>

a. Narasumber (informan)

Dalam penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 informan yang secara terperinci akan dijelaskan pada bab III. Penentuan informan dilakukan dengan meminta pertimbangan pada pengurus NU di Kecamatan Sukolilo.

b. Peristiwa atau aktivitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>23</sup> Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 162-164.

Dengan mengamati peristiwa atau aktivitas, maka dapat dilakukan *cross check* terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Tempau atau lokasi

Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Dengan ini maka kan bisa secara cermat dikaji dan juga ditarik kesimpulan.

d. Dokumen atau arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi antara lain : Bab I yang berisi pendahuluan. Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang pembahasan khittah NU tahun 1926, yang memuat dasar pemikiran kembali ke khittah 1926, dinamika NU setelah kembali ke khittah 1926, politik NU pasca deklarasi PKB dan politik NU pada Pemilu Presiden.

Bab III berisi tentang perilaku politik warga NU. Dalam bab ini akan diteliti tentang pemahaman warga NU kecamatan Sukelilo terhadap khittah 1926 dan perilaku politiknya pada pemilu tahun 2004.

Bab IV merupakan analisa penelitian. Dalam bab ini dilakukan analisa terhadap pemahaman warga NU tentang khittah 1926 dan perilaku politiknya pada pemilu 2004 yang dirinci menjadi; relasi antara warga NU, hubungan kyai dan organisasi NU dalam politik.

Bab V merupakan penutup, yang berisi sebagai jawaban atas rumusan masalah pada bab I, serta juga berisi saran-saran.



## BAB II

### KHITTAH NU TAHUN 1926

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian Khittah 1926

Khittah dalam segi bahasa mempunyai arti tanah yang diberi batas<sup>1</sup>. Namun istilah khittah kemudian secara khusus menjadi populer untuk Nahdlatul Ulama. Kata khittah itu suatu garis perjuangan dan kepribadian Nahdlatul Ulama, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan, maupun urusan kemasyarakatan, baik secara perseorangan maupun secara organisasi.<sup>2</sup> Kemudian angka 1926 yang berada di belakang khittah adalah tahun didirikannya Nahdlatul Ulama. Sehingga makna khittah dalam pandangan KH. Sahal Mahfudz adalah NU yang dulu pernah menjadi parpol akan kembali ke khittah semula ketika berdiri (tahun 1926), yaitu sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di bidang kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan.<sup>3</sup>

Menurut rumusan Munas (Musyawarah Nasional) tahun 1983 di Situbondo, pengertian khittah adalah : 1) Landasan berpikir, bersikap dan bertingkah laku warga NU dalam semua tindak dan kegiatan serta dalam setiap pengambilan keputusan. 2) Landasan tersebut dalam paham Ahlussunnah waljama'ah yang ditetapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar keagamaan maupun

---

<sup>1</sup> Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, (Jogjakarta: Munawwir, 1984), 379.

<sup>2</sup> Bahrul Ulum, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi ?*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2003), 86.

<sup>3</sup> Marzuki Wahid, *Dinamika NU, Perjalanan Sosial dari Mukhtamar Cipasung (1994) ke Mukhtamar Kediri (1999)*, (Jakarta: Kompas, 2000), 6.

kemasyarakatan, 3) Khittah NU digali dari intisari dari cita-cita dasar didirikannya NU sebagai wadah pengkhikmatan yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah.<sup>4</sup>

Menurut KH. Sahal Mahfudz, khittah 1926 artinya landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>5</sup>

Sedang KH. Ilyas Ruchiyat menegaskan, bahwa kembali ke khittah 1926 adalah secara organisatoris NU tidak lagi menggeluti masalah-masalah politik. Akan tetapi NU dituntut untuk mengaktualisasikan garis-garis perjuangannya dalam bentuk kegiatan yang nyata.<sup>6</sup>

Dengan memutuskan untuk kembali ke khittah 1926, maka akan terjadi proses pendewasaan wawasan kebangsaan pada warga NU yang tadinya hanya terikat pada satu kepentingan kelompok partai politik tertentu menjadi warga yang berwawasan luas dan plural.

Namun menurut Saleh Aldjufri, khittah NU tahun 1926 merupakan strategi politik yang sangat strategis dan berwawasan jauh ke depan. Menurutnya, bahwa strategi yang ditempuh NU itu merupakan langkah mundur sementara dari panggung politik, tetapi untuk meraih tujuan dan kepentingan yang lebih besar bagi NU pada

<sup>4</sup> Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), 188.

<sup>5</sup> Sahal Mahfudz, *Kata Pengantar*, dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), xvii.

<sup>6</sup> *ibid*

masa yang akan datang. Di samping itu juga untuk menjawab situasi krisis yang melanda NU setelah berbenturan dengan tembok kekuasaan.<sup>7</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Dasar Pemikiran Kembali ke Khittah 1926

Pergulatan NU di dunia politik telah membawa organisasi ini ke dalam perjuangan-perjuangan kepentingan dan upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pergulatan semacam ini bukan hanya sebatas pada hubungan dengan kekuatan lain, melainkan pula terjadi di dalam organisasi NU sendiri, yang secara nyata terlibat dari konflik-konflik kepentingan yang pernah terjadi.

Seperti yang dikemukakan pada bab terdahulu, Nahdlatul Ulama pertama kali didirikan sebagai *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan) oleh sekelompok ulama di Surabaya pada 31 Januari 1926. Pembentukan *jam'iyah* ini tiada lain merupakan upaya pengorganisasian potensi dan peran ulama untuk kemudian ditingkatkan dan dikembangkan lebih luas lagi.<sup>8</sup>

Sejak April 1952 NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Selama menjadi partai politik, NU telah mengalami kekaburan identitas. NU sebenarnya adalah organisasi keagamaan tetapi dengan menjadi partai politik maka ia lebih terpaku pada prestasi dan prestise ketimbang menanggapi perkembangan di sekitarnya secara keagamaan. Kembali menjadi organisasi keagamaan adalah jalan

---

<sup>7</sup> Saleh Aldjfri, *Politik NU dan Era Demokratisasi Gus Dur*, (Surabaya: LIPi Sunan Ampel, 1997), 49-56.

<sup>8</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya, Bisma Satu, 1985), 4.

terbaik bagi NU untuk membenahi kelemahannya selama menjadi partai politik dan untuk mengembalikan peran ulama.

Menurut KH. Sahal Mahfudz, hal-hal yang melatarbelakangi munculnya ide

kembali ke khittah 1926 diantaranya adalah : a. jarak waktu antara generasi pendiri dengan generasi penerus makin jauh, b. wilayah garapannya makin luas, c. makin beragamnya latar belakang pimpinan dan warga NU, d. makin berkurangnya peran ulama, e. kepekaan NU terhadap masalah sosial kemasyarakatan sangat lemah, f. kesibukannya hanya bersifat reaktif menanggapi masalah tanpa ditindaklanjuti dengan upaya nyata, dan g. sikap kreatif untuk pembudidayaan warganya makin berkurang.<sup>9</sup>

Sedang Menurut KH. Ach. Siddiq, khittah nahdliyah perlu dirumuskan sebagai pedoman perjuangan dengan didorong oleh berbagai pertimbangan diantaranya adalah :

- a. Makin jauhnya jarak waktu antara generasi pendiri dengan generasi penerus.
- b. Makin luasnya medan perjuangan dan banyaknya jumlah dan macam bidang yang ditangani.
- c. Makin banyaknya jumlah dan macam ragam mereka yang menggabungkan diri pada Nahdlatul Ulama, dengan latar belakang pendidikan dan sub kultur yang berbeda-beda.
- d. Makin berkurangnya peranan dan jumlah ulama generasi pendiri dalam pimpinan Nahdlatul Ulama.<sup>10</sup>

Pengalaman pahit yang dialami NU dalam pergulatan politik nasional, baik ketika menjadi partai politik atau ketika menitipkan aspirasi politiknya dalam Partai

<sup>9</sup> Sahal Mahfudz, *Kata Pengantar*, dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), xviii-xix.

<sup>10</sup> Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyah*, (Surabaya: Balai Buku, 1980), 14-15.

Persatuan Pembangunan (PPP), menjadikan organisasi ini melakukan evaluasi kritis terhadap strategi perjuangan yang dijalankannya. Dan puncak dari evaluasi kritis itu terjadi pada muktamar ke 27 di Situbondo (1984) dengan keputusan agar NU tidak lagi terjun ke politik praktis. Langkah ini kemudian dikenal dengan istilah “kembali ke khittah 1926”.<sup>11</sup>

Keinginan agar NU kembali ke khittah 1926 sebenarnya telah diusulkan sejak muktamar ke 22 di Jakarta tahun 1959. Selanjutnya, gagasan serupa untuk kembali ke khittah 1926 muncul pada muktamar ke 25 di Surabaya tahun 1971. Dan kemudian tuntutan lebih keras lagi tentang kembali ke khittah 1926 juga terjadi pada muktamar ke 26 di Semarang pada 1979. Akhirnya gagasan kembali ke khittah 1926 menjadi salah satu agenda utama pada Munas alim ulama di Situbondo pada 1983, kemudian diputuskan dalam muktamar ke 27 di tempat yang sama pada 1984.<sup>12</sup>

Keputusan yang sangat monumental pada Munas alim ulama tahun 1983 dan muktamar ke 27 tahun 1984 adalah penerimaan asas tunggal pancasila dan keputusan kembali ke khittah 1926.

Dalam keputusan Munas 1983 di Situbondo tentang “Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926” ada empat hal sebagai konsiderans. 1) Sebagai organisasi keagamaan NU telah mengalami hambatan karena kurangnya ikhtiar kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masa. 2) Karena keterlibatan NU dalam kegiatan politik praktis secara berlebihan, sehingga menjadikan NU kurang peka menanggapi

<sup>11</sup> al-Djufri, *Politik NU*....., 49.

<sup>12</sup> Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 132-147.

perkembangan, yang akhirnya NU tidak lagi berjalan sesuai dengan hakekatnya sebagai organisasi keagamaan. 3) Sudah menjadi tekad NU untuk senantiasa terikat dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 4) Ulama sebagai unsur utama NU menyadari keprihatinan terhadap perkembangan NU dan merasa perlu menegaskan pedoman dan petunjuk bagi perkembangan organisasi.<sup>13</sup>

Muktamar NU ke 27 di Situbondo merupakan titik balik dari kegiatan NU yang dilakukan selama ini. Gelanggang politik praktis segera ditinggalkan dan segera memasuki gelanggang sosial keagamaan yang sebelumnya sangat terbelengket. Pada muktamar ini pula titik balik hubungan dengan pemerintah terjadi. Kalau sebelumnya NU “menjaga jarak” dengan pemerintah, maka pada muktamar ini NU berdekatan kembali dengan pemerintah.

Namun langkah politik yang diputuskan NU ini, sebenarnya sejak awal sudah banyak diduga sangat dilematis. Sejak NU memutuskan kembali ke khittah 1926, warga NU memang masih banyak menyebar di berbagai kekuatan partai politik yang ada. Sehingga karena kesibukan mereka dalam mengurus partai membuat mereka tidak sempat untuk mengurus organisasi NU. Sementara itu tokoh-tokoh NU yang menjadi asset politik, kemudian menjadi “pengangguran politik”, karena tidak dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi NU dalam politik.

---

<sup>13</sup> Sitompul, *NU dan ...*, 187-188.

### C. Dinamika NU Pasca Kembali ke Khittah 1926

Sejak dicanangkannya kembali ke khittah 1926 pada muktamar di Situbondo, NU telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Khittah 1926 merupakan titik tolak untuk suatu loncatan yang terus menerus. Di satu pihak, telah menanggalkan beban politik praktis yang sebelumnya membebani NU. Di lain pihak, ia telah memberikan nuansa pluralitas dan keterbukaan dalam segala hal.

Dengan kembalinya NU ke khittah dan menjadi organisasi keagamaan bukan hanya demi meryahuti tuntutan politik pada masa itu, tetapi juga sebuah kesadaran konkret bahwa NU semenjak lahir di tahun 1926 pada dasarnya adalah organisasi yang bergerak di bidang agama, sosial, dakwah dan pendidikan. Dengan kembalinya NU menjadi organisasi keagamaan, uama dapat memfokuskan tenaga dan pikirannya untuk pengembangan dan pemberdayaan umat melalui program yang dipersiapkan secara matang dan meliputi bidang luas. NU telah benar-benar beralih orientasi dari “politik praktis” ke “sosial praktis”, dari “prestise politis” ke “prestise keagamaan” dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan gerakan kembali ke khittah 1926, maka PBNU membentuk proses dengan langkah-langkah sebagai berikut; lima tahun pertama merupakan tahap sosialisasi tentang khittah 1926 dan tahap kedua lima tahun terakhir memasuki pengembangan wawasan khittah.<sup>14</sup>

Meskipun tekad kembali ke khittah 1926 telah diputuskan, namun dalam perjalanannya masih mengalami penyimpangan-penyimpangan. Pergulatan politik

<sup>14</sup> Wahid, *Dinamika NU*....., 6.



masih dilakukannya. Pada pasca kembali ke khittah 1926 tersebut, di dalam tubuh NU terjadi kelompok-kelompok yang berbeda mengenai khittah 1926. *Pertama*, kelompok yang menghendaki politik praktis yang dipimpin oleh Idham Khalid. *Kedua*, kelompok yang menghendaki NU kembali ke khittah 1926. Kelompok ini terdiri dari KH. Abdul Hamid, KH. Ahmad Siddiq dan KH. Ali Maksum. *Ketiga*, kelompok yang menghendaki NU kembali ke khittah 1926 tetapi juga tidak meninggalkan politik. Kelompok ini di dalamnya terdapat KH. Yusuf Hasyim.<sup>15</sup>

Meskipun NU sudah menyatakan kembali ke khittah 1926 yang berarti NU tidak lagi berpolitik, tetapi gelombang tuntutan agar NU kembali ke politik praktis nampak semakin kuat. Menurut Saleh Aldjufri, ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu; *pertama*, kembalinya NU ke politik itu sama sekali tidak menyalahi khittah 1926. Karena berdirinya NU adalah bermotivasi politik. *Kedua*, keputusan kembali ke khittah 1926 hanyalah sebuah strategi politik. *Ketiga*, aspirasi NU baik di Golkar maupun PPP tidak tersalurkan. *Keempat*, masih adanya kelemahan dalam sistem politik Indonesia, yang mengharuskan NU untuk tampil memecahkan masalah-masalah tersebut. *Kelima*, sejak NU memisahkan diri dari partai politik praktis, semakin tidak jelas karir politiknya.<sup>16</sup>

Perjalanan NU dari muktamar ke muktamar pasca kembali ke khittah 1926 sangat dinamis dan variatif. Setelah muktamar Situbondo, semangat NU sangat besar sekali untuk meninggalkan gelanggang politik praktis. Beberapa keputusan PBNU

<sup>15</sup> Marijan, *Quo Vadis NU*....., 138.

<sup>16</sup> Al-Djufri, *Politik NU* ..... , 65-67.

dibuat, terutama yang berkaitan dengan pemisahan kegiatan politik praktis dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka PBNU membuat SK No. 01/PBNU/I-1985, tentang perangkapan jabatan. Isinya :

1. Pengurus harian NU tidak diperkenankan merangkap jabatan menjadi pengurus harian partai politik/organisasi sosial politik manapun,
2. Batas waktu pelaksanaan tersebut pada angka 1 (satu) di atas adalah satu tahun untuk wilayah dan dua tahun untuk cabang,
3. Kepada pengurus wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia supaya mengambil langkah-langkah ke arah pelaksanaan keputusan itu.<sup>17</sup>

Menurut Kacung Marijan, ada dua alasan yang mendasari dikeluarkannya SK tentang pelarangan rangkap jabatan. *Pertama*, ingin menunjukkan bahwa NU benar-benar ingin meninggalkan gelanggang politik praktis. *Kedua*, sebagai pengulangan pemutusan tali hubungan antara NU dengan PPP, yang sebelumnya terjalin erat, bahkan sebagai penyokong utama.<sup>18</sup>

Menjelang pemilu tahun 1987, terjadi tarik menarik antara pihak yang menginginkan NU tidak melepaskan diri dari PPP, dan pihak yang tetap konsisten dengan hasil mukamar ke 27 di Situbondo.

Untuk meyakinkan kepada pemerintah bahwa NU benar-benar tidak terikat dengan PPP, maka menjelang pemilu tahun 1987 timbul pemikiran dalam benak PBNU untuk mengurangi suara PPP. Kemudian terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai "aksi pengembosan". Mereka melakukan aksi tersebut di basis-basis utama NU, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Seperti yang dilakukan oleh

<sup>17</sup> Marijan, *Quo Vadis NU* ....., 157.

<sup>18</sup> *Ibid*.

H. Syafii Sulaiman, dalam acara penutupan Konferensi Cabang NU Lumajang. Ketika itu ia berkata, “NU bukan PPP, bukan Golkar, bukan pula PDI”.<sup>19</sup>

Menjelang Munas alim ulama di Cilacap pada tahun 1987, Mahbub Junaidi berpendapat agar NU kembali berpolitik praktis. Ide ini kemudian dikenal dengan istilah “khittah plus”. Menurut Mahbub, NU memiliki anggota yang cukup besar. Karena itu NU semestinya tidak bisa berdiri di luar pagar dan cukup terbatas sebagai tukang pemberi suara.<sup>20</sup>

Perjalanan NU kemudian banyak diwarnai oleh pertikaian antar pengurus NU sendiri. Pada muktamar ke 28 di Krapyak Yogyakarta pada tahun 1989 merupakan arena konstitusional untuk melakukan penjegalan terhadap Abdurrahman Wahid (Ketua PBNU). Dalam muktamar ini terdapat dua kelompok yang menentang Abdurrahman Wahid untuk tampil lagi. Dua kelompok tersebut adalah : kelompok Kiai As’ad Syamsul Arifin dan kelompok KH. Idham Chalid yang didukung oleh politisi NU yang ada di PPP.<sup>21</sup> Tetapi akhirnya Abdurrahman Wahid beserta kelompok intelektual NU yang didukung oleh para kiai nonpolitisi (kiai progresif) memperoleh kemenangan.

Pada muktamar ke 29 di Cipasung (tahun 1994), terjadi konflik yang tajam hingga memunculkan PBNU tandingan yang dimotori oleh Abu Hasan. PBNU tandingan, yang bernama KPPNU (Koordinator Pengurus Pusat NU), bermula dari kecewanya Abu Hasan dalam pemilihan ketua tarafdiziyah yang tidak diakomodasi

<sup>19</sup> *Ibid.*, 162.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 180.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 183.

dalam kepengurusan PBNU. Padahal suara pendukung Abu Hasan sangat besar dengan perbandingan antara Gus Dur dan Abu Hasan yaitu 174 : 142.<sup>22</sup>

Setelah rezim orde baru di bawah kendali presiden Soeharto tumbang, maka euforia politik warga Indonesia mencapai puncaknya. Tidak ketinggalan warga NU juga turut dengan sukacita menyambut euforia tersebut dengan mengajukan usulan kepada PBNU agar disediakan partai politik yang menampung aspirasi dan perjuangan warga NU yang telah lama tidak berada dalam partai sendiri. Sehingga terbentuklah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998..

#### **D. Politik NU Pasca Deklarasi PKB**

Pendeklarasian PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai partai politik berbasis massa NU yang secara langsung dibidani oleh PBNU, mau tidak mau akan menggeser paradigma lama dimana keputusan kembali ke khittah 1926 yang selama ini cenderung dipahami sebagai tidak berpolitik akan kembali menjadi bahan perdebatan di tingkat internal NU. Sebab batasan sikap politis yang digariskan NU pada putusan Situbondo itu sendiri masih membuka ruang untuk diperdebatkan.

Rumusan politik NU yang diperjelas pada muktamar ke 28 di Krapyak Yogyakarta pada tahun 1989 itu adalah sebagai berikut :

1. Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan bahwa warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 28

tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan mora, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik Bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disekapati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlul Sunnah Wal Jamaah.
7. Berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi NU menurut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>23</sup>

Sehari setelah mundurnya Soeharto, PBNU mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air yang menginginkan PBNU membentuk partai. PBNU merespon banyaknya usulan tersebut dengan hati-hati. Hal tersebut

<sup>23</sup> Dikutip dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 187-188.

didasarkan pada keputusan muktamar NU ke 27, bahwa secara organisasi NU tidak terikat dengan partai politik manapun.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Kehati-hatian NU dalam merespon persoalan politik dengan membentuk tim lima, merupakan antisipasi akan terjadinya polemik yang akhirnya justru merugikan NU. Karena sejak muktamar Situbondo konstitusi khittah 1926 masih memiliki kekuatan hukum sebagai landasan berpikir, bersikap dan berperilaku bagi NU. Padahal dalam putusannya secara tegas NU tidak akan melibatkan diri dalam politik praktis. Sementara, NU yang mewadahi jutaan kepentingan warganya didesak untuk memberikan saluran politik dan pendeklarasian PKB merupakan jawabannya.

Berdirinya PKB yang kemudian dinyatakan sebagai wadah satu-satunya penyalur aspirasi politik warga NU, oleh Salahuddin Wahid disebut sebagai eksperimen Abdurrahman Wahid.<sup>24</sup> Disebut sebagai eksperimen, karena partai yang didirikan dan dinyatakan sebagai *authorized party* oleh PBNU itu ternyata tidak punya kesamaan asas dan tujuan dengan *jam'iyah* NU. Oleh Gus Dur dan Matori Abdul Jalil dinyatakan bahwa PKB bukan partai Islam dan merupakan partai yang menginginkan negara sekuler. Sedangkan *jam'iyah* NU menyatakan bahwa tujuannya adalah "berlakunya syariat Islam di dalam masyarakat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia".

Tampilnya ketua PBNU KH. Abdurrahman Wahid menjadi ketua dewan syuro DPP PKB dan menjadi presiden ke 4 merupakan fakta yang sekaligus

---

<sup>24</sup> Salahuddin Wahid, *Negeri di Balik Kabut Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000), 12.

merupakan jawaban atas perdebatan elit NU yang tidak ada hentinya tentang keterkaitan antara aktifitas politik NU dan khittah 1926. Jawaban sepekulatif ini tidak bisa disalahkan begitu saja, karena keberadaan sosok KH. Abdurrahman Wahid sulit dipisahkan dari identitas dan sekaligus simbol NU baik ketika mendeklarasikan PKB, menjadi dewan syuro maupun menjadi presiden RI.

Menurut Bahrul Ulum, dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI ke 4, terdapat pergeseran paradigma politik para elit NU, dari orientasi kultural menjadi struktural, yang juga berimplikasi pada pergeseran makna khittah. Hal ini menjadikan NU berada pada posisi dilematis. Satu sisi memang tampak terangkat, tapi di sisi lain justru menyeret NU lebih jauh ke wilayah politik praktis dan meninggalkan paradigma gerakan sosial keagamaannya, yang semula ini menjadi fokus gerakannya.<sup>25</sup>

Munculnya sikap pro kontra berdirinya PKB, dengan enteng dijawab oleh Abdurrahman Wahid (ketika itu sebagai ketua PBNU), “Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai *jam'iyah* tidak menjadi dan tidak pernah menjadi partai politik. NU sudah pas keberadaannya saat ini sebagai ormas Islam”.<sup>26</sup>

Kontroversi pendirian PKB oleh PBNU yang telah dikomentari atau disikapi oleh beberapa tokoh NU dan pengamat politik, semakin menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan konsep khittah itu

<sup>25</sup> Ulum, *Bodohnya NU* ....., 169.

<sup>26</sup> DPW PKB Jawa Timur, *Dokumen Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (tt: DPW PKB Jawa Timur, 1998) 17.



sendiri. Dengan demikian, dengan lahirnya PKB, berarti NU membulatkan tekad untuk kembali ke kancah politik praktis.

Menurut Bahrul Ulum, pendirian PKB juga telah menimbulkan kontroversi tentang posisi khittah. Kontroversi itu menimbulkan dua penafsiran. *Pertama*, penafsiran yang secara relatif lebih bersifat normative (sesuai dengan konsep murni khittah). Penafsiran ini menganggap bahwa tindakan itu sebagai pelanggaran dari konsep khittah. *Kedua*, penafsiran yang berangkat dari perubahan-perubahan orientasi dan perilaku NU sebagai konsekuensi dari situasi yang terjadi. Penafsiran ini menganggap bahwa khittah bukan harga mati yang membatasi tindakan dan membentuk partai, sepanjang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>27</sup>

Lahirnya PKB menimbulkan banyak protes dari kalangan warga NU yang lain. Sehingga kemudian banyak bermunculan partai-partai yang berbasis NU, diantaranya adalah SUNI (Serikat Uni Nasional Indonesia) pimpinan Abu Hasan (rival Gus Dur pada muktamar di Cipasung), PNU (Partai Nahdlatul Ummah) didirikan pada 16 Agustus 1988 dipimpin oleh KH. Syukron Makmun. PKU (Partai Kebangkitan Ummat) dipimpin oleh KH. M. Yusuf Hasyim dan juga didukung oleh Salahuddin Wahid (adik Gus Dur). Kemudian, secara alamiah partai-partai NU selain PKB banyak berguguran karena aturan yang menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti pemilu pada tahun 2004.

Kehadiran PKB yang diikuti partai lainnya yang sama-sama berbasis massa NU sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perubahan peran sosial politik NU.

<sup>27</sup> Ulum, *Bodohnya NU* ..... , 179.

Perubahan sosial politik NU ke depan tentu akan menambah kerumitan tersendiri.

Karena aktifitas NU dengan fungsi fasilitasnya akan dipaksa berurusan dengan elit NU yang akan duduk dalam jajaran partai, legislatif dan eksekutif. Meski semua orang menyadari itu bukan wilayah kerja NU, melihat situasi dan kondisi sosial politik dari warga NU, maka merupakan suatu keharusan adanya keterlibatan NU dalam urusan sosial politik.

Faktor kedekatan NU dengan PKB, keluarnya pernyataan elit PKB dan elit NU yang mencoba menyeret massa NU masuk ke wilayah politik PKB, menjadikan makna khittah 1926 sebagai bahan perdebatan jilid II, dimana secara formal kedudukan NU tetap sebagai organisasi keagamaan yang independen sebagaimana digariskan oleh keputusan NU kembali ke khittah 1926, tapi pada dataran realitas kebijakan NU sulit tidak bersentuhan dengan politik seperti fatwa PBNU mendukung PKB.

Dengan mendasarkan pada realitas obyektif kondisi sosial politik yang melingkupi NU dan warga NU yang ternyata tidak semuanya berada di PKB dan masih ada di partai lain, maka yang diperlukan oleh politisi NU sekarang adalah sebuah kesantunan dalam berpolitik dan belajar menghargai sebuah perbedaan politik. Sebab kalau tidak, konflik politik yang bersumber pada perbedaan makna khittah 1926 akan terus berlanjut ke arah konflik sosial yang kurang menguntungkan bagi NU dan warga NU.

Oleh karena itu, disamping perlu kearifan dan menerima perbedaan politik, tidak kalah pentingnya persoalan netralitas organisasi NU akan menjadi variabel

yang sangat menentukan terhadap kebersamaan dan keutuhan warga NU dalam memilih partai politik. Dalam kaitan ini, netralitas organisasi NU ditempatkan sebagai perekat umat dari berbagai vaksi politik warga NU. Begitu pula sebaliknya, tanpa adanya sikap netral dari keduanya, maka fungsi perekat umat akan menipis, dan kalau terjadi konflik politik dari sayap NU keduanya akan kehilangan vitalitasnya sekedar untuk terlibat mendamaikan.

#### **E. Politik NU Pada Pemilu Presiden**

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang menggunakan sistem yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali diadakan dua kali pemilu, yaitu pemilu legislatif untuk memilih DPRD, DPR dan DPD pada 5 April dan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung pada dua tahap yaitu 5 Juli dan 20 September.

Dengan memakai sistem pemilihan langsung, maka ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi calon yang berasal dari NU untuk menggaet suara sebanyak-banyaknya. Karena NU merupakan organisasi yang sudah mengakar di Indonesia terutama di Jawa.

Dengan mempertimbangkan besarnya massa NU tersebut, maka banyak partai politik yang melirik calon dari NU untuk dijadikan calon presiden maupun calon wakil presiden. Sehingga pada pemilu presiden kali ini, NU menempatkan empat kader terbaiknya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka adalah, Hasyim Muzadi (Cawapres dari PDI Perjuangan), Hamzah Haz (Capres dari PPP),

Salahuddin Wahid (Cawapres dari Partai Golkar) dan Jusuf Kalla (Cawapres dari Partai Demokrat).

Banyaknya calon dari NU yang direkrut oleh partai politik menjadikan keruwetan dan kerawanan konflik. Konflik yang sangat terasa dari adanya pemilu presiden ini terjadi ketika Hasyim Muzadi, yang ketika itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PENU, dicalonkan sebagai wakil presiden oleh PDI Perjuangan dengan berpasangan bersama Megawati.

Keberangkatan Hasyim Muzadi memang tidak membawa institusi NU, melainkan pribadi Hasyim sendiri. Ada kekhawatiran bila Hasyim nantinya akan menjadikan NU sebagai komoditas dalam perolehan suara. Begitu juga terjadi kerawanan terjadinya konflik dan perbedaan di arus bawah menanggapi persoalan majunya Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid.

Untuk menghindari dijadikannya NU sebagai kendaraan politik dari masing-masing capres dan cawapres, maka rapat syuriah PBNU tanggal 16 Mei 2004 di Rembang Jawa Tengah membuat *Qarar Syuriah* yang berisi sembilan butir di antaranya adalah :

1. Mengucapkan syukur bahwa banyak kader NU yang diajak partai politik untuk menjadi capres maupun cawapres.
2. Banyaknya tokoh NU yang diajak parpol tersebut dipandang sebagai rahmat.
3. Syuriah NU mendukung mereka untuk berkompetisi secara sehat, berakhlak dan dengan niat tulus karena Allah
4. PBNU mengingatkan untuk berkampanye dengan cara yang terhormat dan sportif serta menghindari digunakannya cara-cara yang tidak terpuji.
5. Mereka yang dicadikan calon dilarang untuk melibatkan institusi NU, dan menon-aktifkan sementara kepada Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid beserta tim suksesnya.

6. Kepada pengurus NU diharapkan bersikap netral dan tidak memihak.
7. Menghimbau kepada calon agar menata hati dan niat yang tulus untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
8. Kepada warga NU, agar ikut mensukseskan pemilu dengan semangat persaudaraan.
9. Kepada kyai NU dimohon untuk kompak dan menjaga *qaraar* NU ini.<sup>28</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>28</sup> Dikutip dari Duta Masyarakat, *Qaraar PBNU*, 22 Mei 2004, hal. 1-7.

### BAB III

#### PEMAHAMAN WARGA NU KECAMATAN SUKOLILO

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**TENTANG KHITTAH NU 1926 DAN PERILAKU POLITIKNYA**

##### A. Kultur dan Geografis Kecamatan Sukolilo

Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Secara geografis, Sukolilo berada di bagian timur bersama dengan kecamatan Rungkut, kecamatan Kenjeran, kecamatan Tenggilis dan kecamatan Mulyorejo.

Pada awalnya, kecamatan Sukolilo merupakan wilayah yang amat luas dengan lingkup wilayah sampai Mulyorejo dan Kenjeran. Namun seiring perkembangan kota Surabaya, maka Sukolilo kemudian dipecah menjadi tiga wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Mulyorejo dan kecamatan Kenjeran.

Sedang kecamatan Sukolilo memiliki tujuh kelurahan yang meliputi; kelurahan Menurpumpungan, kelurahan Nginden Jangkungan, kelurahan Semolowaru, kelurahan Klampis Ngasem, kelurahan Medokan Semampir, kelurahan Keputih dan kelurahan Gebang.

Sebagai daerah yang berada di tepi garis pantai, penduduk Sukolilo pada awalnya adalah petani, baik itu petani tambak maupun petani sawah. Menurut Geertz, penduduk dengan latar belakang petani merupakan tipologi dari kriteria santri. Sementara menurut Mulchan, santri dalam sosiologi adalah sekelompok masyarakat

yang kesehariannya diwarnai kehidupan yang religius.<sup>1</sup> Kemudian pada era tahun 80-an di Sukolilo banyak berdiri perguruan tinggi-perguruan tinggi. Di Sukolilo terdapat satu perguruan tinggi negeri dan sembilan perguruan tinggi swasta. Sehingga Sukolilo merupakan daerah yang banyak dihuni oleh para mahasiswa dari pelbagai penjuru tanah air.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 114.365 jiwa, Sukolilo merupakan daerah yang padat dan dinamis, belum lagi penduduk musiman yang sedang mendalami pengetahuan di berbagai perguruan tinggi mencapai 10.000 lebih. Tingginya angka penduduk musiman yang datang dari pelbagai daerah, akan mendatangkan persoalan kultur di Sukolilo.

Lokasi penelitian memilih tempat di Sukolilo ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kultural warga Sukolilo yang sangat heterogen baik dari latar belakang pendidikan maupun aktivitas sosial politiknya.

## B. NU di Kecamatan Sukolilo

Sesuai dengan AD/ART Nahdlatul Ulama<sup>2</sup>, kepengurusan NU paling rendah (ranting) berada di kelurahan. Sehingga seharusnya di Sukolilo terdapat tujuh ranting yang berada di masing-masing kelurahan. Namun, kebijakan NU Cabang Kota Surabaya memperkenankan pemekaran ranting di tingkat kelurahan dengan mempertimbangkan perkembangan di masing-masing ranting.

<sup>1</sup> Abdul Muir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: SIPRES, 1994), 1.



Akhirnya perkembangan ranting-ranting NU di Sukolilo mencapai 12 ranting yang meliputi; ranting Menurpumpungan I (Menur), ranting Menurpumpungan II (Pumpungan), Ranting Menurpumpungan III (Pumpungan), ranting Klampis Ngasem, ranting Klampis Semalang, ranting Semolowaru, ranting Nginden, ranting Jangkungan, ranting Medokan Semampir, ranting Keputih, ranting Gebang dan ranting Kejawan.

Menurut ketua Tanfidziyah MWC NU Sukolilo, pemekaran ranting tidak bisa dihindari karena kondisi geografis masing-masing kelurahan yang banyak dipisahkan oleh daerah perumahan atau kampus. Sehingga hal tersebut menyulitkan koordinasi antar anggota di tingkat ranting.<sup>2</sup>

Kepengurusan NU di Sukolilo terisi secara lengkap, baik itu MWC NU, Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU dan IPPNU. Hal ini menandakan aktivitas warga NU di Sukolilo sangat padat. Bahkan NU kecamatan Sukolilo memiliki kantor yang sangat besar dibandingkan dengan kantor-kantor NU di kecamatan lainnya di Surabaya.

Aktivitas NU di Sukolilo, baik itu rutinan yang bersifat keagamaan maupun seremonial yang bersifat pendidikan dan sosial sering diadakan. Bapak-bapak (NU) mengadakan kegiatan tahlil, istighotsah dan iuran kematian. Sementara ibu-ibu (Muslimat) juga mengadakan tahlil, penyuluhan KB maupun pendirian pendidikan di tingkat TK dan SD.

---

<sup>2</sup> Rahmat Hasan, Ketua Tanfidziyah MWC NU kecamatan Sukolilo, *Wawancara*, Sukolilo, 6 April 2004.

Para generasi muda yang berada dalam GP. Ansor dan Fatayat NU seringkali mengadakan pelatihan dan kaderisasi. Menurut data yang didapat, pada tahun 2004 terdapat kegiatan antara lain; Diklat Terpadu Dasar (DTD), pelatihan IT (Informasi Technology) dan Training of Trainer (ToT).

Sementara IPNU (Ikatan Pelajar NU) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) juga tidak ketinggalan dalam kegiatan. Pada tahun 2004 mengadakan kegiatan berupa; bakti sosial untuk anak yatim, pesantren ramadhan dan try out bagi mahasiswa dan SMA.

### **C. Pemahaman tentang Khittah 1926**

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap lima orang yang dijadikan sebagai informan penelitian. Dari kelima informan tersebut terdapat dua pengurus NU di tingkat MWC (Majelis Wakil Cabang) Sukolilo dan tiga orang anggota NU. Untuk mendapat gambaran yang obyektif, maka sangat penting untuk dipaparkan posisi masing-masing informan dalam kepengurusan di MWC NU Sukolilo dan kepengurusan partai politik. Tabel di bawah ini akan menjelaskan kedudukan masing-masing informan.

**Tabel 1**  
**Kedudukan Informan dalam NU MWC Sukolilo**  
**Dan Partai Politik**

No	Identitas Informan	Kedudukan dalam MWC NU	Kedudukan dalam Partai Politik
1	HRH	Pengurus NU	Independen
2	HjR	Pengurus Muslimat	Independen
3	HAF	Pengurus NU	Pengurus PKB
4	AM	Anggota	Pengurus PPP
5	CA	Anggota	Pengurus P. Golkar

Sumber Data : Hasil wawancara pada bulan April 2004

Pada penelitian tabel di atas, peran politik masing-masing informan sangat beragam. Dua dari pengurus MWC NU kecamatan Sukolilo bersikap non partisan (independen) sedangkan yang satu merangkap dalam kepengurusan partai. Sedangkan dua informan lainnya menjadi pengurus partai tertentu.

Selain itu juga, penelitian ini memaparkan perbedaan perilaku memilih partai politik dari kelima informan tersebut. Argumentasi informan untuk memilih partai politik sandarannya berada pada kebijakan politik NU yaitu khittah 1926 yang masih berpeluang untuk diperdebatkan. Di bawah ini dipaparkan perilaku politik kelima informan tersebut dalam memilih partai politik pada pemilu 2004.

**Tabel 2**  
**Pilihan Partai Politik dari Informan**

No	Identitas Informan	Pilihan Partai
1	HRH	Memilih PKB
2	HjR	Memilih PKB
3	HAF	Memilih PKB
4	AM	Memilih PPP
5	CA	Memilih Partai Golkar

Sumber Data : Hasil wawancara pada bulan April 2004.

Tabel perilaku memilih partai politik di atas menunjukkan adanya perbedaan pilihan partai politik. Tiga informan dengan tegas menyatakan memilih PKB pada pemilu 2004, karena PKB didirikan oleh Nahdlatul Ulama'. Dan para ulama' juga berfatwa untuk mendukung PKB.

Informan yang menjadi pendukung PKB ini tidak memandang kebijakan NU bertentangan dengan garis khittah 1926. Karena sikap politik NU yang digariskan oleh khittah 1926, dinilainya bukan berarti NU tidak bersentuhan dengan persoalan politik. Selama NU tidak berubah menjadi partai politik dan tetap sebagai organisasi keagamaan, maka langkah NU tidak bisa dipertentangkan dengan ketentuan khittah.

Pandangan informan HRH, khittah secara formal diartikan sebagai kesadaran untuk meletakkan NU sebagai organisasi sosial keagamaan non parpol yang bidang garapannya meliputi; pendidikan, agama, sosial, ekonomi dan politik kebangsaan. Untuk itu NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih partai politik, dan melarang perangkapan jabatan dengan partai politik.

Informan HAF yang memilih PKB menyatakan, keputusan NU tentang kembali ke khittah 1926 pada muktamar ke 27 di Situbondo tahun 1984 telah dihapus oleh keputusan muktamar ke 30 di Kediri tahun 1999 yang merekomendasikan kepada warga NU untuk menyalurkan aspirasinya kepada partai yang pendiriannya difasilitasi oleh PBNU. Menurutnya, "Keputusan khittah sama dengan al-Qur'an yang terdapat nasikh dan mansukh."

Sedang dua dari informan yang tidak memilih PKB, menyatakan bahwa khittah NU tahun 1926 dengan tegas memberikan kebebasan kepada warganya untuk

memilih partai politik manapun yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

Dua informan ini menyatakan bahwa langkah politik organisasi NU dinilai sudah menyimpang dari ketentuan khittah dan NU sudah masuk ke wilayah politik praktis.

Menurut CA khittah membawa angin segar bagi para anggota NU.

“Seharusnya khittah membawa berkah bagi warga NU, karena dengan tidak terikat dengan partai tertentu, menjadikan warga NU berada di mana-mana. Dan ini membawa era emosional menjadi rasional. Warga NU dibebaskan memilih partai yang justru memberikan manfaat bagi dirinya dan bangsa. Kalau saya masuk Partai Golkar itu tidak menyalahi khittah, tetapi justru mengamalkan khittah secara konsisten.” Kata CA.

#### **D. Perilaku Politik**

Penelitian tentang perilaku politik warga NU dibagi dalam dua bahasan, yaitu pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Karena pada pemilu tahun 2004 memakai model pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan dengan waktu yang tidak bersamaan.

##### **1. Pemilu Legislatif**

Berdasarkan data hasil penelitian yang sudah dilakukan, keterlibatan ulama' (kiai) pada pendeklarasian PKB menjadi dasar panutan warga NU dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, perilaku warga NU dalam memilih partai banyak dipengaruhi oleh fatwa politik dari PBNU dan kiai. Seperti halnya yang disampaikan

oleh Machfudz MD, bahwa suara warga NU ditentukan oleh tiga hal yaitu PKB, PBNU dan Gus Dur.<sup>3</sup>

Berdasarkan data tersebut, maka kondisi sosial warga NU menempatkan kiai sebagai panutan, sehingga tindakan dan fatwa kiai diyakini patut diikuti dan diteladani. Melihat kondisi warga NU yang masih diwarnai sikap paternalistis tersebut, langka NU mendeklarasikan PKB dan mengeluarkan fatwa politik di mana PKB adalah partainya warga NU, sangat logis kalau kemudian menjadi variabel penting dalam menjelaskan perolehan suara PKB pada pemilu 2004 di Sukolilo.

Pada pemilu kali ini, partai yang menjadi basis warga NU tidak terlalu banyak, hanya PKB dan PPP. Hal tersebut tidak seperti pada pemilu 1999, di mana warga NU banyak mendirikan partai politik. Di bawah ini disajikan perolehan suara masing-masing partai yang didukung oleh informan :

**Tabel 3**  
**Perolehan Suara dari Partai yang didukung Informan**

No	Nama Partai	Perolehan	Prosentase
1	PKB	12.483	15,77 %
2	PPP	1.620	2,04 %
3	Partai Golkar	2.750	3,47 %

Sumber : PPK kecamatan Sukolilo pada pemilu tahun 2004

Berdasarkan hasil perolehan suara pemilu tahun 2004 di Sukolilo terjadi perbedaan yang sangat jauh antara perolehan suara PKB dengan perolehan suara partai lain yang didukung oleh informan. Perbedaan perolehan suara tiga partai tersebut dapat dijelaskan dari empat perspektif.

<sup>3</sup> Duta Masyarakat, *Gus Dur Dukung Wiranto-Wahid*, (Jakarta: 1 Juli 2004), 2.

Pertama, keterlibatan NU dalam pendeklarasian PKB mendorong kepengurusan di tingkat MWC (kecamatan) sampai tingkat ranting (kelurahan) untuk menggerakkan warga NU guna mendukung dan memilih PKB. Jaringan struktural NU yang telah mengakar di Sukolilo banyak memberikan keuntungan tersendiri bagi PKB dalam meraih suara.

Pengakuan informan HAF yang mendukung dan memilih PKB didasarkan atas keputusan PBNU yang memfasilitasi lahirnya PKB, hal inipun sebagai jawaban atas makna khittah 1926 yang menurut sebagian orang tidak jelas.

- “Khittah 1926 adalah merupakan strategi untuk keluar dari PPP, sambil melihat kondisi perpolitikan Indonesia, NU tidak terlibat politik praktis. Ketika peluang berdirinya partai baru dibuka, maka tidak salah bagi NU untuk mendirikan partai sendiri. Dan ini secara tidak langsung menggugurkan keputusan muktamar di Situbondo yang mengartikan khittah 1926 adalah tidak berpolitik.”

Kedua, keterlibatan kiai dalam kepengurusan PKB memiliki pengaruh kuat untuk memilih PKB. Dalam tradisi warga NU, kiai adalah seorang tokoh yang patut untuk ditaati dan dipanut dalam segala hal. Budaya paternalistik yang masih kental di Sukolilo turut memberikan andil yang besar terhadap perolehan suara PKB di Sukolilo.

“Kiai saya jadi pengurus PKB di daerahnya, sehingga sangat tidak mungkin kalau saya sebagai santrinya tidak mengikuti beliau dalam memilih PKB. Apalagi kiai-kiai sepuh yang lain juga banyak yang memberikan dukungan kepada PKB.” Ujar informan HRH.

Ketiga, aktifitas kegiatan rutin NU yang ada di ranting-ranting juga menjadi faktor yang dominan pada perolehan suara PKB. Kegiatan rutin semisal tahlil,

istighotsah, maulidan dan lain-lain seringkali menjadi ajang kampanye dari PKB.

Sosialisasi gambar partai menjadi sangat mudah dilakukan oleh PKB.

Apalagi pada pemilihan legislatif dengan pilihan langsung ini, PKB menerjunkan seluruh caleg yang ada di Dapil (Daerah Pilihan) III yang meliputi kecamatan Sukolilo, kecamatan Rungkut, kecamatan Tenggilis, kecamatan Mulyorejo untuk menjangking massa sebanyak-banyaknya sebagai persyaratan untuk dapat dipilih sebagai anggota legislatif.

Keempat, ibu-ibu Muslimat NU juga punya pengaruh yang kuat dalam mendulang suara PKB di kecamatan Sukolilo. Aktivitas Muslimat NU yang padat, baik di tingkat MWC maupun ranting seringkali menjadi ajang kampanye bagi PKB untuk mengenalkan program-program partai dan gambar partai. Bahkan untuk ibu-ibu menempati rangking pertama dalam kegiatan ajang sosialisasi bagi PKB. Di bawah ini disajikan data kegiatan sosialisasi PKB di Sukolilo :

**Tabel 4**  
**Aktivitas PKB di Sukolilo**

No.	Aktivitas	Sasaran Kampanye	Tempat
1	Pengadaan KTA	Muslimat dan Fatayat	Seluruh ranting
2	Istighotsah rutin	GP. Ansor	Ranting Keputih
3	Maulid Nabi	Muslimat	Menurpumpungan
4	Ceramah Khofifah Indar P.	Muslimat	Gedung MWC
5	Ceramah Arif Junaidi	NU & GP Ansor	Gedung MWC
6	Pembagian kerudung	Muslimat dan Fatayat	Seluruh ranting

Sumber : DPAC PKB kecamatan Sukolilo

Keempat alasan latar belakang politik di atas, tidak terjadi pada partai selain PKB, walaupun ada hanya kecil sekali. Keterlibatan NU secara struktural dalam



mendukung PKB tidak terlepas dari sikap PBNU yang mengklaim bahwa PKB adalah satu-satunya partai warga NU.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Faktor politik yang lahir dari kebijakan PBNU tersebut memiliki korelasi signifikan dengan pengakuan dari kelima informan tersebut. Tiga dari lima informan dengan tegas mengakui memang hanya PKB yang memiliki legitimasi cukup kuat sebagai partai politiknya warga NU.

## ***2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden***

Dengan sistim pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan oleh rakyat, maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh tim sukses dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk turun ke masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, di mana pada pemilihan presiden dan wakil presiden ini, NU menempatkan banyak kadernya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga warga NU menjadi terbelah dalam menentukan pilihannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Satu dari tiga orang informan yang pada pemilu legislatif menentukan pilihannya pada PKB, cenderung mendukung pasangan Mega-Hasyim. Dengan alasan bahwa Hasyim merupakan kader terbaik NU yang berjuang dari tingkat bawah, sehingga tidak diragukan lagi ke-NU-annya. Sementara informan HjR memilih pasangan Wiranto-Wahid dengan alasan bahwa pasangan tersebut direkomendasikan oleh PKB secara resmi, sedangkan Hasyim mencalonkan diri atas

nama pribadi bukan institusi NU. Kemudian informan HAF lebih memilih untuk tidak memilih, karena Gus Dur tidak menjadi calon.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di bawah ini disajikan tabel pilihan informan pada pemilihan presiden dan

wakil presiden pada pemilu 2004 di kecamatan Sukolilo

**Tabel 5**  
**Pilihan Informan pada Pasangan Presiden dan Wakil Presiden**  
**pada Pemilu 2004 di Sukolilo**

No	Identitas Informan	Pilihan Capres & Cawapres	
		Putaran I	Putaran II
1	HRH	Mega-Hasyim	Mega-Hasyim
2	HjR	Wiranto-Wahid	SBY-Kalla
3	HAF	Golput	Golput
4	AM	Hamzah-Agum	Mega-Hasyim
5	CA	Wiranto-Wahid	Mega-Hasyim

Sumber Data : Hasil wawancara

Berpindanya pilihan informan HRH, di mana pada pemilu legislatif dia memilih PKB kemudian pada pemilu presiden memilih Mega-Hasyim, tidak terlepas dari sikap patuh dan taatnya pada kiai yang pernah menjadi gurunya. “Sudah sepatutnya saya mengikuti kiai saya.” Begitu ujar HRH. Sementara dua informan lainnya, yaitu HjR dan HAF yang pada pemilu legislatif memilih PKB kemudian pada pemilu presiden memilih Wiranto-Wahid, mendasarkan alasannya pada keputusan dari DPP PKB yang memberikan rekomendasi kepada warga PKB untuk memilih Wiranto-Wahid. Sikap ini juga sama pada informan AM dan CA, yang memilih pasangan Capres dan Cawapres dengan mendasarkan alasannya pada keputusan induk partainya masing-masing.

Pada pemilu presiden dan wakil presiden ini, terdapat hal yang sangat menarik. Di mana dua pasangan Capres dan Cawapres, yaitu Mega-Hasyim dan Wiranto-Wahid, yang banyak didukung oleh elit NU dan PKB ternyata kalah suara dibandingkan dengan pasangan SBY-Kalla. Hal karena pasangan SBY-Kalla banyak diuntungkan oleh media yang selalu menempatkan dirinya pada urutan teratas.

Sementara untuk putaran II, terjadi perpindahan pilihan dari masing-masing informan setelah pasangan yang didukungnya pada putaran I tidak masuk ke putaran II. Informan HJR memilih SBY-Kalla disebabkan simpati dan kagum pada sosok pribadi SBY yang pada kampanye putaran I tidak menanggapi dengan emosional segala kampanye negatif yang ditujukan pada dirinya. Sedangkan informan CA yang seorang aktivis Golkar memilih Mega-Hasyim, karena Partai Golkar telah memutuskan untuk membangun koalisi kebangsaan bersama partai lain untuk mendukung pasangan Mega-Hasyim.

Di bawah ini disajikan data perihal perolehan suara pada pemilu Capres dan Cawapres pada putaran I dan II.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Tabel 6**  
**Perolehan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**  
**Tahun 2004 di Sukolilo**

No	Capres dan Cawapres	Putaran I	%	Putaran II	%
1	Wiranto-Wahid	10.058	12,70	-	
2	Mega-Hasyim	19.427	24,54	21.759	27,49
3	Amien-Siswono	12.150	15,35	-	
4	SBY-Kalla	19.856	25,08	29.212	36,90
5	Hamzah-Agum	1.569	1,98	-	
	<b>Total suara sah</b>	<b>63.060</b>	<b>79,67</b>	<b>50.971</b>	<b>64,40</b>

Sumber : PPK kecamatan Sukolilo pada pemilu tahun 2004

Fenomena yang menarik pada pilpres adalah tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik itu suara yang tidak sah atau yang tidak hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dari jumlah pemilih di Sukolilo yang mencapai 79.147, pada putaran I terdapat 16.087 (20,32%) pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sedang pada putaran II angka golput meningkat menjadi 28.176 (35,59%).

Menurut informan HAF, meningkatnya angka Golput pada pilpres di antaranya dipengaruhi oleh sikap Gus Dur yang tidak secara tegas menentukan pilihannya, bahkan Gus Dur seringkali mengatakan Golput. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap warga NU di Sukolilo dalam menentukan pilihannya.

"Gus Dur merupakan panutan warga NU dan PKB. Warga NU menganggap Gus Dur sebagai keturunan KH. Hasyim Asy'ari yang punya otoritas tinggi terhadap NU, sehingga banyak warga NU yang mengikuti langkah Gus Dur yang Golput dan juga sebagai solidaritas dukungan terhadap Gus Dur yang dicekal sebagai calon presiden". Ujar HAF.

Untuk selanjutnya data dari hasil wawancara terhadap kelima informan di atas akan dilakukan analisa pada bab berikutnya.

---

## BAB IV

### ANALISA PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan paparan hasil penelitian dari lima informan yang diteliti di kecamatan Sukolilo, didapat data adanya pengaruh struktural NU dan kewibawaan kyai (ulama) terhadap perilaku memilih partai politik warga NU di Sukolilo pada pemilu tahun 2004. Temuan data penelitian ini perlu dilakukan analisis lanjutan guna menemukan akar teoritik yang menghubungkan antara sikap politik NU, kewibawaan kyai dan perilaku memilih warga NU kecamatan Sukolilo terhadap partai politik

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan hasil wawancara dengan lima informan di kecamatan Sukolilo. Dari hasil wawancara tersebut terdapat empat faktor yang mempengaruhi pilihan warga, yaitu keterlibatan struktural NU, keterlibatan kyai dalam kepemimpinan partai, aktifnya kegiatan rutin NU dan peran Muslimat NU. Kemudian analisa dilakukan guna mengetahui pemahaman warga NU Sukolilo tentang Khittah 1926 dan perilaku politiknya pada pemilu 2004. Untuk itu

Pada pembahasan di bawah ini akan dijelaskan kembali data pokok paparan hasil penelitian yang melibatkan kyai dan organisasi NU dalam mempengaruhi perilaku memilih partai politik warga NU di kecamatan Sukolilo pada pemilu tahun 2004.

## A. Pemahaman tentang Khittah 1926

Lengsernya Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998 telah mengubah konfigurasi perpolitikan Indonesia secara fundamental. Partai-partai politik baru dengan berbagai basis ideologi, baik agama maupun non-agama bermunculan bagaikan tumbuhnya jamur di musim penghujan. Hal ini mengingatkan pada situasi politik Indonesia di tahun 1950-an, di mana politik aliran begitu dominan. Dan pada tahun tersebut, NU menjadi partai politik lantaran kecewa terhadap sikap sebagian kelompok yang ada di dalam Masyumi.

Pada pertengahan tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan pada pertengahan tahun 1980-an NU keluar dari partai politik (kembali ke khittah) juga sebagai buntut kekecewaan yang mendalam terhadap kelompok minoritas yang ada di dalam PPP.

Keluarnya NU dari PPP yang kemudian diputuskan dalam Mukhtamar di Situbondo tahun 1984 dengan sebutan kembali ke khittah 1926 merupakan keputusan yang mengandung banyak penafsiran. Karena keputusan tersebut tidak secara tegas menyebut PPP sebagai partai yang harus ditinggalkan.<sup>1</sup> Banyak kalangan mengartikan khittah sebagai larangan resmi untuk memainkan peran politik dan mempengaruhi pilihan anggota. Namun menurut Hasyim Muzadi, khittah adalah sikap dasar NU tentang masalah keagamaan, sosial, hubungan agama dan negara,

---

<sup>1</sup> Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 263.

serta hidup keseharian.<sup>2</sup> Sedangkan dalam masalah pilihan politik, menurut Hasyim, warga NU dipersilahkan berpolitik tanpa menyangkut atau membawa-bawa institusi.

NU memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan urusan politik, meskipun ia adalah organisasi keagamaan. Dalam pandangan Mustofa Bisri, NU selalu diperhitungkan ketika setiap kali membutuhkan banyak suara.<sup>3</sup> Pentingnya posisi dan peran NU dalam perpolitikan nasional memang tidak bisa dibantah. NU merupakan faktor kunci panggung politik sejak kemerdekaan tahun 1945 karena partai Islam pertama, Masyumi, yang anggotanya terdiri dari kalangan Islam “modernis” dilarang pada tahun 1960.<sup>4</sup> Di samping itu, NU memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan secara konstitusional dari Soekarno ke Soeharto.

Begitu dominannya peran NU dalam bidang politik membawa konsekuensi bagi warga NU untuk selalu bersinggungan dengan urusan politik. Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah informan menuturkan sebagian dari informan memandang penting bahwa NU harus terlibat aktif dalam politik nasional, baik itu dalam legislatif maupun eksekutif. Sementara sebagian yang lainnya menuturkan bahwa NU cukup bergerak di bidangnya sendiri yaitu sosial, keagamaan dan pendidikan.

Informan HAF, yang menuturkan bahwa keputusan muktamar ke-27 di Situbondo telah dikoreksi oleh muktamar ke-30 di Kediri, memandang perlu sekali NU terlibat dalam urusan politik. Menurutnya, adanya banyak partai yang didirikan

<sup>2</sup> Jawa Pos, 30 Mei 2004, hal. 3.

<sup>3</sup> Jawa Pos, 2 Mei 2004, hal. 4.

<sup>4</sup> Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara.....*, xi.

oleh warga NU akan membuat terpecah-pecahnya suara kepentingan NU, sehingga NU harus membuat satu partai. Hal ini akan memudahkan pengkoordinasian antar warga NU untuk berperan dalam sistim pemerintahan.

Sementara informan yang lain, AM dan CA, memandang bahwa keterlibatan NU dalam perpolitikan memang perlu, tetapi tidak harus merubah jati diri NU menjadi partai politik. Cukup bagi NU memberi pencerahan kepada warganya tentang urusan kenegaraan dan pemerintahan. Kalau NU berubah jadi partai politik, maka NU akan selalu berhadapan dengan penguasa. Dan keluarnya NU dari politik praktis akan berguna bagi NU untuk memperbaiki citranya yang kurang menguntungkan, yaitu sebagai kelompok oposisi. Bagi informan AM dan CA, NU harus mengarahkan kegiatannya ke pendidikan dan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat.

Pemikiran informan AM dan CA, memberikan analog tentang masa silam NU pada masa Orde Baru yang selalu dipinggirkan oleh penguasa. Penguasa Orde Baru saat itu prihatin terhadap potensi ketidakstabilan politik yang ditimbulkan oleh golongan Islam politik radikal. Saat itu, NU tampil sebagai rekan ABRI yang resmi, sedangkan ormas Islam lainnya kebanyakan dirayu untuk bekerja sama, dikontrol dan ditindas.<sup>5</sup>

Terpinggirkannya NU ditanggapi berbeda oleh warga NU. Sebagian memandang bawah perlakuan tidak adil yang diberikan kepada NU karena keikutsertaan organisasi ini dalam Orde Lama dengan menerima Nasakom.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 151.



Sementara yang lainnya menganggap tersisihnya NU karena kurangnya “kemampuan politik NU sendiri.”<sup>6</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dinamika perjuangan NU bersinggungan dengan kepentingan keagamaan dan kenegaraan dapat ditelusuri dari rekaman peristiwa sebelum Indonesia merdeka sampai era reformasi. Kontribusi perjuangan NU sebelum Indonesia merdeka, dapat dijadikan pertimbangan bagi NU untuk memulai karir politik.

Konsistensi sikap kepeloporan NU sebagai organisasi keagamaan yang menaruh peduli pada persoalan bangsa, terjadi pada masa Orde Baru. Di mana saat itu NU mendapat tekanan dari pemerintah, justru NU menjadi pelopor dalam penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal.

Keterlibatan NU dalam gelanggang politik praktis sampai akhirnya memilih menjadi organisasi independen, merupakan konsekuensi logis dari organisasi besar yang mewadahi beragam kepentingan warganya. Selain itu, kebijakan dan langkah yang diambil NU selalu bersentuhan dengan wilayah politik praktis, mengindikasikan kuatnya hubungan NU dan politik sebagai implikasi dari kemauan politik dari kalangan elit NU. Oleh karena godaan NU sangat berat dalam mewujudkan independensi dan memegang khittah 1926, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perjuangan yang lebih serius dalam mempertahankan konsistensi NU sebagai organisasi keagamaan yang independen.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 176-177

## B. Perilaku Politik Warga NU pada Pemilu 2004

### 1. Hubungan Organisasi NU dan Kyai dalam Politik

Pada penelitian yang dilakukan penulis di kecamatan Sukolilo, terdapat temuan yang menghubungkan antara keterlibatan NU secara organisasi dalam mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya pada salah satu partai politik. Jaringan struktural organisasi NU dengan kekayaan tradisi yang berada di kecamatan Sukolilo sudah sangat mengakar sampai ke tingkat massa yang paling bawah.

Begitu juga peran kyai (tokoh) dalam kepemimpinan partai juga menjadi magnet yang menjadi daya tarik sendiri. Kekuatan jaringan sosial dan kultural yang dibangun oleh kyai dengan massa akar rumput mampu memberikan ketetapan pada pilihan warga NU di Sukolilo.

Dengan melihat karakteristik pola hubungan yang melibatkan kyai dan organisasi NU, terdapat pemikiran sosiologi yang patut dikemukakan yaitu tentang kesadaran kolektif dari Emile Durkheim. Sumbangan pemikiran Durkheim akan dijadikan kerangka berfikir untuk melakukan analisis terhadap perilaku politik warga NU yang dipengaruhi oleh keberadaan jaringan organisasi NU dan kyai yang secara interaktif memiliki hubungan sangat erat yang didasarkan pada hubungan agama, ideologi, kultural dan politis.

Durkheim dalam menganalisa dinamika masyarakat menggunakan dua pendekatan dengan istilah solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesadaran kolektif yang menunjuk pada totalitas

kepercayaan dan sentiment bersama. Bentuk solidaritas ini tergantung pada individu yang memiliki sifat yang sama, menganut kepercayaan yang sama dan pola normatif yang sama pula. Kesadaran kolektif antara individu sangat tinggi dalam membentuk kesatuan sosial, sehingga apa yang dikatakan benar oleh orang seperti kyai atau tokoh secara spontan dibenarkan, dan apa yang dicela secara spontan oleh kyai atau tokoh maka dicela juga oleh masyarakat.

Bentuk solidaritas ini ditandai dengan kerasnya hukum yang bersifat menekan. Sedang solidaritas organik didasarkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi sehingga menuntut adanya peribagian kerja. Solidaritas organik ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan yang berfungsi untuk melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara individu.<sup>7</sup>

Dengan memberi penjelasan tentang masyarakat yang mengikuti solidaritas mekanik, kesadaran kolektif memiliki andil besar dalam mewujudkan solidaritas sosial seperti dalam agama, kekerabatan dan kesukuan.

Di mana nilai-nilai primordial masih merupakan sumber penting untuk membangkitkan solidaritas kelompok inti yang ada dalam masyarakat.

Pola hubungan yang menggambarkan adanya interaksi antara organisasi NU, kyai dan warga NU dapat dilacak dari peristiwa sejarah yang menempatkan persoalan agama, ideologi, kultural dan politik menjadi pertimbangan penting bagi berdirinya organisasi NU. Dalam perkembangan NU, kebersamaan antara kyai dan organisasi NU terus berlangsung baik.

---

<sup>7</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Jilid I*, ( Jakarta, Gramedia, 1986), 48

Kebersamaan jaringan sosial politik yang melibatkan warga NU hamper tidak pernah lepas dari kyai dan jaringan organisasi NU.<sup>8</sup> Kesadaran bersama berbagai individu warga NU yang diikuti tindakan bersama terlihat mesra pada saat warga NU membutuhkan partai politik sampai pendirian dan perjuangan politik PKB. Melihat pola interaksi yang demikian, maka keberhasilan perjuangan PKB di kecamatan Sukolilo menduduki peringkat atas tidak terlepas dari adanya hubungan erat antara warga NU, kyai dan organisasi NU.

Dewasa ini pola hubungan antara kyai dengan santri mengalami perubahan. Seringkali hubungan erat antara kyai dan organisasi menjadi rujukan bagi masyarakat. Organisasi menggantikan kedudukan kyai sebagai pemegang hak tunggal dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam.<sup>9</sup> Jika semula kyai merupakan referensi tunggal berbagai pola perilaku dan sekaligus modus pemenuhan kepentingan massa, kini juga beralih kepada organisasi. Hal ini menandakan bahwa kesadaran kolektif semakin memperoleh dukungan legalisasi sosial dan membentuk format baru struktur sosial dimana warga NU hidup dan memenuhi kepentingannya.

Keseragaman perilaku sebagian besar warga NU kecamatan Sukolilo dalam memilih partai politik merupakan bagian tak terpisakan dari fenomena sosiologis tentang kesadaran kolektif dan kesatuan tindakan yang melibatkan

<sup>8</sup> Khoiro Ummatun, *Perilaku Politik Kyai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 99.

<sup>9</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: SIPRES, 1994), 13.

kyai dan organisasi NU. Jawaban informan HAF dan HRH memandang posisi strategis politik kyai yang ada di kepengurusan PKB mulai dari tingkat pusat, wilayah sampai kepengurusan cabang memiliki kontribusi besar bagi perwujudan perilaku politik warga NU dalam memilih partai politik pada pemilu tahun 2004.

Jawaban informan HRH menempatkan ketokohan kyai memiliki kontribusi dalam menentukan pilihan warga NU. Seperti diungkapkannya, bahwa kyai-kyai besar termasuk gurunya memutuskan mendirikan dan mendukung PKB, sangat berat rasanya kalau orang seperti saya ini tidak mendukung dan memilih PKB.

Informan HAF mengungkapkan sebagai seorang santri yang dibesarkan dalam kultur pesantren, patuh dan hormat pada kyai sudah menjadi keharusan. Kalau kyai besar sudah mendukung partai tertentu, maka warna politik dari warga NU sudah bisa ditebak akan mendukung partai pilihan kyai tersebut. Karena Ulama telah menjadi salah satu fungsi dari struktur organik Islam yang tidak terpisah dengan masyarakat.<sup>10</sup>

Kyai memiliki kedudukan tinggi berkat pengetahuan keagamaan yang mereka miliki. Dalam pandangan warga NU, kyai dianggap sebagai pengganti Nabi yang harus selalu diteladani perilakunya. Anggapan warga NU ini sejalan dengan keputusan Musyawarah Antarpimpinan Pesantren Tinggi

---

<sup>10</sup> Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis*, (Jakarta: Rajawali, 1985), 63.

seluruh Indonesia pada tanggal 14-17 Desember 1988 di Wisma Haji

Cempaka Putih Jakarta yang menuturkan :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 “Ulama adalah hamba Allah yang *khasyatullah*, yaitu mengenal Allah secara hakiki. Mereka adalah pewaris Nabi, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya. Mereka jadi pemimpin dan panutan yang *uswah khasanah* dalam ketakwaan dan istiwomah. Sifat ini menjadi landasan beribadah dan beramal sholeh. Mereka bersikap benar dan adil serta tidak takut kepada celaan, tidak mengikuti hawa nafsu, aktif menegakkan keadilan dan mencegah kemunkaran. Mereka tidak mau mengangkat orang-orang yang menjadikan Islam bahan permainan, sendau gurau sebagai pemimpin. Mereka adalah pemersatu umat, tegas memperjuangkan dan meninggikan Islam, berjuang di jalan Allah, serta melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam mencapai keridhoan Allah SWT.”<sup>11</sup>

Keberadaan kyai dalam tradisi NJ adalah sebagai pemimpin. Dan sejarah telah memberikan banyak bukti bahwa peristiwa-peristiwa monumental banyak dipengaruhi oleh pemimpin. Berhubung dengan sangat pentingnya aspek kepemimpinan dalam masyarakat, maka kiranya adalah wajar apabila masalah kepemimpinan mendapat analisa dalam penelitian ini. Seperti yang dituturkan oleh informan HRH, bahwa keputusan politiknya banyak dipengaruhi oleh kyai-kyai yang menjadi pemimpin organisasi NU.

Secara pengertian, kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan.<sup>12</sup> Sementara dalam ensiklopedi umum tahun 1973 penerbitan Yayasan Kanisius halaman 3 mengartikan

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama dan Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1995), 47.

<sup>12</sup> YW. Sunindhia, SH. Dan Dra. Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Eina Aksara, 1988), 4.

kepemimpinan sebagai hubungan erat antara seseorang dengan sekelompok manusia, karena adanya kepentingan bersama. Hubungan itu ditandai tingkah laku yang tertuju dan terbimbing daripada manusia yang seorang itu, manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok yang mengikutinya disebut sebagai yang dipimpin.<sup>13</sup>

Para ahli mengemukakan teori kepemimpinan dalam tiga teori, yaitu : teori genetik, teori sosial dan teori ekologis.<sup>14</sup> Uraianannya adalah sebagai berikut :

### ***Teori Genetis***

Teori ini mengemukakan pendapat bahwa kepemimpinan adalah takdir yang sudah digariskan seseorang sejak lahir. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan, karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, suatu saat ia akan menjadi seorang pemimpin

### ***Teori Sosial***

Teori ini menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.

### ***Teori Ekologis***

Teori ini mengatakan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat

<sup>13</sup> M. Karjadi, *Kepemimpinan (Leadership)*, (Bogor: Politeia, 1981), 1.

<sup>14</sup> YW. Sumindhia, SH. Dan Dra. Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan.....*, 18-21.

kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat yang memang telah dimiliki itu.

Dari ketiga teori kepemimpinan di atas, maka kyai-kyai dalam organisasi NU dapat dikategorikan dalam ketiga teori di atas. Adakalanya kyai NU yang sekarang itu adalah keturunan kyai pendiri NU, seperti Gus Dur. Adakalanya menjadi kyai karena kewibawaan dan keilmuan yang dimilikinya, seperti Hasyim Muzadi.

Kewibawaan seorang kyai akhirnya membawa kesadaran kolektif yang menunjuk pada totalitas kepercayaan, sentimen, sifat, menganut kepercayaan dan mengikuti pola normatif dari seorang kyai. Karena pada kenyataannya tindakan sosial dan politik warga NU masih diwarnai oleh pola hubungan sentralisasi pengaruh kyai dan organisasi NU. Pola hubungan yang mendasari perilakunya didasarkan pada hubungan agama, ideologi, kultural dan politis dengan organisasi NU telah mampu menggerakkan pilihan warga NU terhadap suatu partai politik.

Hubungan agama, dipertemukan dengan sama-sama memperjuangkan kepentingan Islam sebagai konsekuensi logis menjadi organisasi keagamaan. Hubungan ideologi, didasarkan pada prinsip yang sama-sama memiliki kepentingan mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Keberadaan kyai dan organisasi NU sama-sama berlatar belakang tradisional, membuat keduanya memiliki hubungan kultural yang erat. Sedangkan hubungan politis



dipertemukan dengan kesamaan cita-cita memperjuangkan sebuah tatanan masyarakat adil dan makmur yang dilandasi semangat ketaqwaan kepada Allah, sehingga keduanya memiliki hubungan timbal balik dalam mengendalikankan keputusan politik sebagai wujud tanggung jawab moral.

## 2. Relasi Antar Warga NU

Dalam era modern ini, pendidikan warga NU sudah heterogen. Dia tidak hanya dididik di pesantren-pesantren, melainkan juga di sekolah-sekolah umum atau pesantren modern yang sudah mengadopsi pendidikan umum sebagai akibat dari perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Begitu juga perubahan struktur pekerjaan warga NU yang selama ini dikenal sebagai mubaligh, khatib atau guru agama kemudian banyak yang beralih menjadi pegawai. Perubahan sosial kehidupan warga NU ini ditunjukkan oleh perubahan struktur dan mekanisme serta pola interaksi berbagai pusat kehidupan warga NU.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Andree Feillard pada tahun 1990 terhadap 203 santri di pesantren Tebu Ireng Jombang, menunjukkan bahwa 34% santrinya terdiri atas anak pegawai negeri, 10% anak pegawai biasa, 44% anak pengusaha kecil (beberapa diantaranya adalah sebagai petani) dan hanya 23% berasal dari keluarga guru agama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mulkhan, *Mitos Politik.....*, 13.

<sup>16</sup> Feillard, *NU Vis a Vis.....*, 355.

Dalam pandangan Mulkhan, terdapat lima pusat kehidupan umat Islam yang mempengaruhi kehidupannya, yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan masjid, lembaga pengajian dan organisasi keagamaan.<sup>17</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, ternyata tidak seluruh warga NU memilih partai yang direkomendasi oleh PBNU. Dua dari lima informan memutuskan untuk memilih partai yang sesuai dengan hati nuraninya tanpa harus mengikuti referensi dari PBNU. Keputusan yang dilakukan oleh informan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dimana kedua informan tersebut berada, baik lingkungan rumah, pendidikan, organisasi selain NU maupun pekerjaan.

Informan CA misalnya, dia meruturkan lingkungan pekerjaanya adalah yang menjadikan dirinya untuk memilih partai yang berbeda dengan PBNU. Sementara AM menuturkan, bahwa dirinya mengikuti partai yang sekarang ni karena diajak temannya.

Hal ini menandakan bahwa warga NU cenderung tidak menjadikan pilihan politik sebagai pilihan keagamaan (syari'ah), tetapi sebagai ekspresi pertemanan atau perkoncoan selain pola hubungan kliental.<sup>18</sup> Hubungan kliental dan perkoncoan itu sebenarnya bisa dijadikan dasar bagi strategi pemenangan pemilu bagi partai berbasis NU. Namun untuk itu diperlukan

<sup>17</sup> Mulkhar, *Mitos Politik.....*, 11.

<sup>18</sup> Abdul Murir Mulkhan, *Mengapa Partai Islam Kalah, Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu 1999 sampai P'lpres*, (Jakarta: Alvabet, 1999), 124.

suatu infrastruktur politik yaitu organisasi dan gerakan dakwah. Dengan pendekatan gerakan sosial dan dakwah diharapkan bisa mengembangkan pola hubungan perkoncoan dan kliental dengan massa umat yang dijadikan basis massa.

---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

1. Banyaknya penafsiran yang berkembang di kalangan NU mengenai makna dari khittah menjadikan kesimpangsiuran perjalanan NU dalam menghadapi dunia politik praktis. Hal ini kemudian juga disikapi oleh warga NU di tingkat paling bawah dengan banyaknya argumen yang mengartikan tentang khittah 1926. Sebagian menandakan bahwa khittah adalah memberi kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan nuraninya. Ada juga yang berasumsi bahwa khittah NU telah di-*mansukh* dengan muktamar NU ke 30 di Kediri yang menghimbau warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai yang kelahirannya difasilitasi oleh PBNU. Sementara ada yang berpendapat, bahwa khittah adalah keputusan final yang mengatur hubungan warga NU dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Beragamnya pandangan warga NU dalam menanggapi khittah 1926 berimplikasi terhadap perilaku politiknya pada pemilu tahun 2004 di kecamatan Sukolilo. Dengan demikian, suara warga NU tidak bulat dan utuh dalam mendukung dan memilih partai politik tertentu. Pilihan warga NU pada partai politik di kecamatan Sukolilo dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu

keterlibatan struktural NU, keterlibatan kyai dalam kepengurusan partai, aktifnya kegiatan rutin NU dan peran Muslimat NU. Paling dominan diantara keempat tersebut adalah peran struktural organisasi NU dan kewibawaan kyai.

## B. Saran

1. Keterlibatan NU dalam panggung politik praktis di Indonesia terdapat kerawanan yang sangat berarti. Apalagi dengan sistim pemilu secara langsung, akan tidak menutup kemungkinan banyaknya tokoh untuk menggunakan NU sebagai komoditas politik untuk meraih kekuasaan. Kesan yang muncul adalah NU hanya dijadikan alat untuk mendongkrak suara tokoh. Lagi-lagi NU akan terjebak pada sikap oportunistis dan pragmatisme dalam melegitimasi tokoh tertentu. Implikasi yang paling negatif adalah kesan yang muncul bahwa jabatan di kepengurusan NU merupakan sarana untuk melaju pada level kekuasaan.
2. Untuk itu NU sebagai organisasi sosial keagamaan, harus kembali menegaskan identitasnya sebagai ormas yang menekankan pada budaya bukan ikut berebut kekuasaan. Cukup menjadi pelajaran bahwa sejarah gerakan politik NU masa silam tidak menghasilkan hal berarti bagi warga NU malah menyebabkan terbengkelainya urusan NU dalam pemberdayaan warganya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU Surabaya*: Bisma Satu.  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Amir, Zainal Abidin . 2003 *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* Jakarta: Pustaka LP3S.
- Aldjfri, Saleh. 1997. *Politik NU dan Era Demokratisasi Gus Dur* Surabaya: LIPI Sunan Ampel.
- Black, James A. & Champion, Dean J. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian: Sosial Bandung*: Eresco.
- Feillard, Andree. 1999. *NU Vis a Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* Yogyakarta: LKiS.
- Hasyim, Masykur. 1998. *Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik Partai Persatuan Pembangunan* Surabaya: Yayasan Sembilan Lima.
- Hsubky, Badruddin. 1995. *Dilema Ulama dan Perubahan Zaman* Jakarta: Gema Insasi Press.
- 1998. *Dokumen Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Jawa Timur*.
- Johnson, Doyle Paul . 1986. *Teori Sosiologi Jilid I* Jakarta, Gramedia.
- Karjadi, M. 1981. *Kepemimpinan (Leadership)* Bogor: Politeia.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah, Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu 1999 sampai Pilpres* Jakarta: Alvabet, 1999.  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Mulkhan, Abdul Munir. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri* Yogyakarta: SIPRES.
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU, Setelah kembali ke Khittah 1926* Jakarta: Erlangga.
- Munawwir, Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* Jogjakarta: Munawwir.
- Smith, Donald Eugene. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis* Jakarta: Rajawali.

- Sunindhia, YW. Dan Widiyanti, Ninik. 1988. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern Jakarta* : Bina Aksara.
- Sitompul, Einar Martahan. 1989. *NU dan Pancasila Jakarta*: Pustaka Sinar Harapan.
- Siddiq, Achmad. 1980. *Khitan Nuhdityah Surabaya*. Balai Buku.
- Suprayogo, Imam & Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama Bandung*: Remaja Rosdakarya.
- Ummatin, Khoiro. 2003. *Perilaku Politik Kyai Yogyakarta*: Pustaka Pelajar.
- Ulum, Bahrul. 2003. *Bodohnya NU apa NU Dibodohi ?*Yogyakarta: Ar-ruzz Press.
- Wahid, Marzuki. 2000. *Dinamika NU, Perjalanan Sosial dari Mukhtamar Cipasung (1994) ke Mukhtamar Kediri (1999)* Jakarta: Kompas.
- Wahid, Salahuddin. 2000. *Negeri di Balik Kabut Sejarah* Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id